



# E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://epaper.dpr.go.id>

---

**Judul** : IBU KOTA NEGARA, PUPR BELUM ALOKASIKAN DANA PEMBANGUNAN FISIK  
**Tanggal** : Jumat, 13 Maret 2020  
**Surat Kabar** : Bisnis Indonesia  
**Halaman** : 21

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum mengalokasikan anggaran pembangunan fisik ibu kota negara. Namun, jika diperlukan, kementerian itu siap merevisi anggaran yang ada guna menalangi kebutuhan dana pada awal pembangunan fisik. Aprianus Doni T. [aprianus.doni@bisnis.com](mailto:aprianus.doni@bisnis.com). Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga mengatakan bahwa belum adanya anggaran khusus terkait dengan pekerjaan konstruksi fisik lantaran masih menunggu terbitnya Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN). Padahal, pemancangan tiang perdana (groundbreaking) rencananya dilakukan pada Oktober 2020. “Groundbreaking itu baru mengawali [pembangunan fisik tahap pertama]. Terkait dengan biaya, hingga saat ini Kementerian PUPR belum mengalokasikan biaya [konstruksi] fisik karena masih menunggu aspek regulasi [UU IKN],” katanya, Kamis (12/3). Danis menambahkan bahwa jika dalam perkembangannya memang dibutuhkan uang muka pada proses awal pembangunan fisik, PUPR siap merevisi anggaran kementerian yang ada. “Misalnya, untuk tahap awal dibutuhkan uang muka saja ya, mungkin tidak terlalu besar bisa sekitar Rp200 miliar—Rp300 miliar, saya kira dimungkinkan dari, misalnya, kita melakukan revisi anggaran PUPR yang ada,” katanya. Lebih lanjut, katanya, dalam pembangunan tahap pertama atau hingga 2024 akan dibangun infrastruktur jalan dan jembatan, perumahan, dan permukiman. Beberapa waktu lalu, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas) Suharso Monoarfa mengemukakan bahwa sudah banyak investor asing yang menawarkan diri untuk ikut dalam proyek pembangunan IKN. Mereka berasal dari Amerika Serikat, Jerman, Singapura, Denmark, Italia, Uni Emirat Arab, Inggris, dan China. Namun, pemerintah yang mewakili para investor asing tersebut baru sebatas mengutarakan minat dan belum memaparkan konsep detail kepada Indonesia. Pemerintah juga masih mempelajari berbagai skema kerja sama yang ditawarkan, khususnya dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) serta investasi langsung. Investasi berskema KPBU dan swasta ditargetkan menjadi sumber utama untuk membiayai pembangunan IKN yang membutuhkan dana Rp466 triliun. SUMBER DANA Berdasarkan data Bappenas, pemerintah memetakan tiga sumber dana untuk membiayai IKN, yaitu Rp89,40 triliun dari APBN, Rp253,40 triliun dari skema KPBU, dan Rp123,20 triliun dari investasi swasta, BUMN, dan BUMD. Jenis sumber pembiayaan yang bisa digunakan, yaitu ekuitas (penanaman modal asing/dalam negeri, investor pasar modal), pinjaman (perbankan asing/dalam negeri), dan obligasi korporasi (investor pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan reksadana). Dana dari APBN digunakan untuk membangun fasilitas pemerintahan primer, antara lain istana negara, gedung legislatif dan yudikatif, bangunan untuk TNI/Polri, pengadaan lahan, ruang terbuka hijau, dan pangkalan militer. Adapun, investasi skema KPBU akan membiayai infrastruktur dasar (air minum dan sanitasi), rumah dinas ASN/TNI/Polri, pembangunan infrastruktur utama, transportasi berbasis rel, sarana pendidikan dan kesehatan, serta pemasyarakatan. Terakhir, alokasi investasi langsung dari swasta, BUMN, dan BUMD dimanfaatkan untuk membangun perumahan umum, perguruan tinggi, science-technopark, sarana kesehatan swasta, dan pusat perbelanjaan. Sebelumnya, Danis menyatakan bahwa kementerian itu akan memulai pembangunan infrastruktur dasar untuk IKN pada akhir tahun ini. “Insyaallah ada groundbreaking infrastruktur dasar pada Q4 [kuartal keempat] atau akhir semester kedua Tahun Anggaran 2020. [Infrastruktur dasar tersebut yaitu] jalan akses, waduk, air bersih,” katanya. (Bisnis, 3 Maret). Saat ini, katanya, Kementerian PUPR menyiapkan rencana desain dan hitungan terkait dengan proyek infrastruktur dasar yang akan dikerjakan tersebut.